

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI JAWA TIMUR

Rizanda Ratna Pradita

Universitas Negeri Surabaya
rizandapradita@yahoo.com

Abstract

The implementation of fiscal decentralization in addition to give an authority to the Local governments, it is affecting the ability of that region to meet public concern also, so that this study aims are to examine the effect of Region Authentic Revenue and General Grant Allocation to Capital Expenditure Budget Allocation. The samples used in the study were 38 Government Districts/Municipalities in East Java which are taken by using the census method. Analysis tool used is double regression test. The results of the test show that the only General Grant Allocation effects to Capital Expenditure Budget Allocation significantly while Region Authentic Revenue has no significant effect against the Capital Expenditure Budget Allocation.

Keyword : General Allocation Fund, Capital Expenditure, Own Revenues.

PENDAHULUAN

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan

meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu 22,64 % seperti dapat dilihat pada lampiran Anggaran Belanja Daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Melihat fenomena yang terjadi, sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pertumbuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum berorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Keefer dan Khemani (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”. UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) yang disampaikan oleh Allen dan Tommasi (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) yang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan asset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-2011.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Struktur APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah, dan (3) Pembiayaan Daerah.

Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah

diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “*block grant*”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.

Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat minimal 26 persen dari total penerimaan dalam negeri *netto*. Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan *Fiscal Sustainability* Pemerintah Indonesia, alokasi DAU dapat lebih besar dari 26 persen dari total pendapatan dalam negeri *netto*.

DAU diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah.

Kebutuhan Fiskal dapat diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam perhitungan DAU, kebutuhan daerah tersebut dicerminkan dari variabel-variabel kebutuhan fiskal sebagai berikut: (a) Jumlah Penduduk, (b) Luas Wilayah, (c) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan (d) Indeks Kemiskinan Relatif (IKR).

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari Hibah Tidak Mengikat, Dana Darurat Dari Pemerintah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Ke Kabupaten Atau Kota, Dana Penyesuaian Dan Dana Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Dari Pemerintah Daerah.

Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat

dalam Pasal 50, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal sendiri terdiri dari: (1) Belanja Modal Tanah, (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan (5) Belanja Modal Fisik Lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengeluaran untuk beban Belanja Modal dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD (Sidik et al, 2002). Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar.

Dalam penelitiannya Holtz-Eakin et.al (1994) menyatakan terhadap keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pada studi yang dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bawasanya dalam jangka panjang transfer DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer DAU dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh temuan empiris yang sama yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1) : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No.32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 2 (H2) : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian assosiasif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur. Data yang dianalisis selama lima tahun yaitu tahun 2007-2011.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur 2007-2011 yang berupa Laporan Belanja Modal, Laporan Dana Alokasi Umum, dan Laporan Pendapatan Asli Daerah.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik.

Uji Regresi Berganda

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (*multiple regression*), hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal.

Uji regresi berganda

digunakan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{DAU} + \beta_2 \text{PAD} + e$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = error

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*) yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi:

Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika t hitung < t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika t hitung > t tabel maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan

F hitung dengan F tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k = 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika F hitung < F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika F hitung > F tabel maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Definisi Operasional

PAD: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

DAU: Dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Belanja Modal: Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, dalam kurun waktu lima tahun (2007-2011). Sampel yang diambil melalui metode sensus adalah keseluruhan dari populasi yaitu yang memiliki pendapatan daerah aktif dan dapat membiayai daerahnya sendiri yang dapat dilihat dari Laporan APBD.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel statistik deskriptif (lampiran) menggambarkan deskripsi variabel-variabel independen dan dependen secara statistik dalam penelitian ini. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, mean merupakan rata-rata yang dihitung dari penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi banyaknya data (Santoso, 2001). Variabel-variabel independen pada penelitian ini

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan variabel dependennya adalah Belanja Modal (BM).

Pada variabel independen pertama, Dana Alokasi Umum (DAU), nilai rata-ratanya adalah Rp 509.369.442.309,71, nilai tertinggi Rp 1.049.561.620.000, nilai terendahnya Rp 188.025.000.000 dan standar deviasi Rp 170.228.880.121,042 menunjukkan adanya variasi yang besar (lebih dari 30% dari nilai mean). Pada variabel kedua yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 51.054.212.388,17, nilai tertinggi sebesar Rp 178.206.361.792, nilai terendah sebesar Rp 11.340.707.505 dan nilai standar deviasinya adalah Rp 27.998.135.789,555 menunjukkan adanya variasi yang besar karena nilainya yang lebih besar 30% dari nilai mean.

Tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata Belanja Modal (BM) yang merupakan variabel dependen adalah Rp 145.117.798.209,63, nilai tertinggi Rp 350.359.837.667 dan nilai terendahnya Rp 28.973.961.400 sedangkan nilai standar deviasinya menunjukkan Rp 65.134.034.641,459 dimana nilainya lebih dari 30% nilai rata-rata.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dari grafik dalam lampiran, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan bebas dari asumsi klasik dimana data tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Dari hasil uji multikolinieritas (lampiran) menunjukkan untuk kedua variabel independen, angka VIF ada di sekitar angka 1 yaitu 1,577. Demikian juga untuk nilai Tolerance mendekati angka 1, PAD bernilai 0,0634 dan DAU 0,634. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat problem multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik (lampiran) terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan.

Uji Auto Korelasi

Berdasarkan tabel (lampiran), nilai Durbin-Watson adalah 1,547. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 174 dan jumlah variabel bebas 2 maka nilai Durbin-Watson 1,54 lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari 4-du maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Regresi Berganda

Atas dasar hasil analisis regresi (lampiran) dan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,567E10 + 0,233DAU + 0,014PAD$$

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Nilai koefisien regresi 0,233 menyatakan bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal pemerintah sebesar 23,3%.

Nilai koefisien regresi 0,014 menyatakan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal pemerintah sebesar 1,4%.

Koefisien Determinasi

Hasil uji menunjukkan nilai koefisien determinasi adalah 0,376. Hal ini berarti hanya 37,6% variabel anggaran belanja modal dapat dipengaruhi oleh kedua variabel independen sedangkan sisanya 62,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lain.

ANALISIS DAN INTERPRESTASI

Hipotesis 1

Uji Statistik t Dana Alokasi Umum menghasilkan nilai koefisien 0,233 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran Belanja Modal. Oleh karena itu H1 diterima.

Hipotesis 2

Hasil pengujian statistik t menyebutkan nilai koefisien PAD 0,014 dan tingkat signifikansinya 0,936 dimana tingkat signifikansi ini jauh lebih besar dari 0,05 sehingga PAD tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, oleh karena itu H2 ditolak.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan penelitian yang dilakukan Prakoso (2004) yang membuktikan secara empiris bahwa besarnya jumlah belanja modal dipengaruhi Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat.

Pengaruh signifikan antara DAU dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh DAU tersebut. Bahkan Abdullah dan Halim (2006) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Sayangnya kontribusi DAU terhadap belanja modal masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakatpun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah

garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sektor usaha kecil masih terabaikan, contohnya PKL).

Dalam jangka panjang transfer DAU berpengaruh terhadap dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.

Hal ini juga disebabkan dana alokasi umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain bagi hasil. Transfer dana alokasi umum merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan transfer dana alokasi umum adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian di daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Seiring dengan masih seringnya terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi mengenai besarnya jumlah DAU yang akan direalisasi mengakibatkan pemerintah daerah sering menggunakan dasar realisasi DAU tahun sebelumnya dalam penyusunan APBD.

Melihat beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian

suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007).

Hasil penelitian ini juga dapat ditemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia Yustikasari & Darwanto (2006) yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal.

Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal belum tentu juga akan semakin tinggi. Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa besarnya PAD tidak menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Pada penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai Belanja Modal seperti terlihat pada lampiran Anggaran Belanja. Artinya tinggi rendahnya PAD pada periode ini tidak berimplikasi pada besarnya alokasi belanja modal daerah.

Selain itu, kondisi ini juga dapat disebabkan karena sejak makin maraknya pengungkapan pejabat daerah dan anggota DPRD ke pengadilan akibat kasus korupsi terhadap Dana Anggaran Belanja Daerah, membuat PAD sebagai salah satu objek korupsi dan mengurangi untuk anggaran belanja modal.

Semua penerimaan daerah dari PAD digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan masing-masing daerah tergantung kebijakan

pemerintah daerah yang dimanifestasikan dalam alokasi belanja modal. Sebab pada dasarnya alokasi belanja yang disusun mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas, dan program-program pembangunan untuk setiap tahun. Alokasi belanja modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Besarnya alokasi belanja modal mempresentasikan kebutuhan daerah termasuk kebutuhan publik.

Perkembangan rasio belanja modal terhadap total belanja kabupaten/kota Jawa Timur menunjukkan persebaran kabupaten/kota yang semakin tidak konvergen dan secara rata-rata juga mengalami kenaikan.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kebijakan pemerintah daerah di dalam mengalokasikan belanja yang disebabkan adanya perbedaan prioritas pembangunan masing-masing daerah. Selain itu adanya peningkatan proporsi belanja rutin terhadap total belanja untuk beberapa kabupaten/kota, sehingga secara umum mengalami kenaikan. Beberapa daerah yang mempunyai rasio belanja modal terhadap total belanja lebih rendah dari daerah lain adalah Kota Batu dan Kabupaten Sumenep, proporsi belanja modal lebih kecil dari 50%. Kota Batu merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Malang tahun 2002, sehingga memerlukan dana yang belum banyak untuk membiayai belanja modalnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka

Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal.

Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai Belanja Modal seperti terlihat pada lampiran Anggaran Belanja.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi.

Pemerintah Daerah harus lebih dapat mengefisienkan jumlah pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan pemanfaatan teknologi, dengan begitu diharapkan Pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar Pemerintah.

Penghapusan honor belanja pegawai yang melekat pada pos belanja langsung atau lebih spesifik pada belanja modal dapat lebih mengefisienkan pengeluaran belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy., dan Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, hal. 1140-1159.
- Abdullah, Syukriy. 2008. *Beda Belanja Barang dengan Belanja Modal*. Viewed 4 August 2012, diakses pada: <<http://syukriy.wordpress.com/2008/09/15/beda-belanja-barang-dgn-belanja-modal/>>
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrayanto. 2010. *Jenis-Jenis Penelitian*. Viewed 4 August 2012, diakses pada: <<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2026135-jenis-jenis-penelitian/>>
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. “Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY, *JAAI*. vol. 8, no. 2, hal. 101-118
- Pramoedyo, Henry. 2012. *Statistika Inferensia Terapan*. Malang: Danar Wijaya.
- Purwoko. 1999. *Kajian Tentang Peranan DAU Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Daerah Otonom*. Viewed 27 July 2012, diakses pada: <[www.fiskal.depkeu.go.id/bkf/kajian/ Purwoko%20-%201999.doc](http://www.fiskal.depkeu.go.id/bkf/kajian/Purwoko%20-%201999.doc)>
- Rafsanjani, Saddam. 2011. *Struktur APBD dan Pengertian-pengertiannya*. Viewed 18 July 2012, diakses pada: <<http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/10/pengertianpengertian-pada-struktur.html>>
- Santoso, Singgih. 2002. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Satria. 2008. *Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Viewed 18 July 2012, diakses pada: <<http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2177328-konsep-pendapatan-asli-daerah-pad/>>

LAMPIRAN

Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	174	11340707505	178206361792	51054212388.17	27998135789.555
DAU	174	188025000000	1049561620000	509369442309.71	170228880121.042
BELANJA_MODAL	174	28973961400	350359837667	145117798209.63	65134034641.459
Valid N (listwise)	174				

Regresi Sub 1

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD, DAU ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.613 ^a	.376	.368	5.177E10	1.547

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.757E23	2	1.378E23	51.431	.000 ^a
	Residual	4.583E23	171	2.680E21		
	Total	7.339E23	173			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.567E10	1.241E10		2.068	.040		
DAU	.233	.029	.609	8.027	.000	.634	1.577
PAD	.014	.177	.006	.080	.936	.634	1.577

a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimen sion	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	DAU	PAD
1	1	2.834	1.000	.01	.01	.02
	2	.125	4.761	.31	.01	.69
	3	.041	8.296	.68	.98	.29

a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	BELANJA_M ODAL	Predicted Value	Residual
24	3.003	3.E11	1.65E11	1.555E11
153	3.712	4.E11	1.58E11	1.922E11

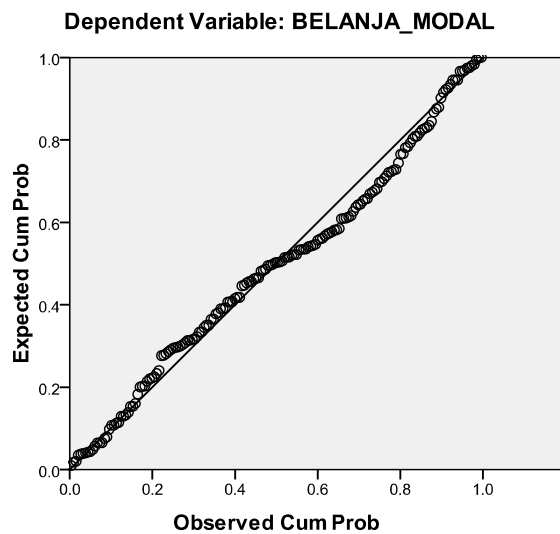
a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	6.97E10	2.72E11	1.45E11	3.992E10	174
Std. Predicted Value	-1.890	3.181	.000	1.000	174
Standard Error of Predicted Value	3.928E9	2.151E10	6.371E9	2.377E9	174
Adjusted Predicted Value	6.89E10	2.66E11	1.45E11	3.983E10	174
Residual	-1.211E11	1.922E11	.000	5.147E10	174
Std. Residual	-2.339	3.712	.000	.994	174
Stud. Residual	-2.347	3.727	.002	1.007	174
Deleted Residual	-1.219E11	1.938E11	2.194E8	5.281E10	174
Stud. Deleted Residual	-2.378	3.877	.004	1.016	174
Mahal. Distance	.002	28.861	1.989	2.980	174
Cook's Distance	.000	.758	.009	.058	174
Centered Leverage Value	.000	.167	.011	.017	174

a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Charts

**Normal P-P Plot of Regression Standardized
Residual**

Scatterplot

Dependent Variable: BELANJA_MODAL

